



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EFIE WIDJAJANTI
2. Jabatan : KEPALA UPT
3. NHK : 648560

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.851.136.500

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.321.198.200
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.321.198.200
3. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/123 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 2.208.740.100

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 647.238.427

1. MOBIL, SUZUKI WAGONR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 49.551.952
2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 11.773.350
3. MOTOR, KAWASAKI ER6F Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 47.439.675
4. MOTOR, KAWASAKI N250 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 25.243.450
5. MOTOR, HONDA SCOOOPY Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.950.000
6. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 71.680.000
7. MOBIL, SUZUKI ERTIGA GX Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 77.950.000



8. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.5 G AT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 213.750.000

9. MOBIL, TOYOTA AGYA 1.2 G MT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 144.900.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 595.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 636.095.594

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 6.729.470.521

III. HUTANG Rp. 567.112.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.162.358.521

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.